

TESIS

**URGENSI PENYIMPANAN MINUTA AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DAN
PRATEKNYA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan*



Oleh:

RIKI KURNIAWAN K

NIM 2120123022

Pembimbing :

Prof.Dr. Ismansyah,SH.,MH

Dr. Azmi Fendri,SH.,M.Kn

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

URGENSI PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK DAN PRAKTEKNYA

Riki Kurniawan, 2120123022, Magister Kenoteriatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024

ABSTRAK

Cyber notary memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik dan hal-hal lain sejenisnya. *Cyber notary* memberikan peluang terhadap kewenangan dalam hal penyimpanan dokumen secara elektronik yang berbentuk dokumen elektronik. Sehingga tampak perbedaan dengan notaris konvensional yang dalam penyimpanan aktanya hanya dalam bentuk kertas. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama Bagaimana urgensi penyimpanan minuta akta secara elektronik dalam era informasi teknologi, kedua Bagaimana praktek penyimpanan minuta akta dalam bentuk hardcopy, ketiga Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap notaris dalam menyimpan minuta akta? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian Penerapan *cyber notary/e-notary* berawal dari munculnya Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan tentang Jabatan notaris dimana didalamnya terdapat pasal 15 ayat 3 UUN yang membuka peluang bahwa kegiatan notaris dapat dilakukan secara elektronik. Selain itu pada Pasal 16 ayat 7 terdapat peluang diberlakukannya *cyber notary/e-notary* terhadap dokumen elektronik, maupun akta elektronik karena pembacaan akta dihadapan notaris adalah tidak wajib ketika para pihak memilih agar akta tersebut tidak dibacakan karena para pihak telah membacanya sendiri. Pasal 68 ayat (1) UndangUndang Kearsipan, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan UndangUndang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE, memberikan interpretasi bahwa minuta akta notaris dapat disimpan secara elektronik. Banyak peraturan yang membuka peluang bagi notaris untuk melakukan penyimpanan arsip secara elektronik, hal ini memunculkan probabilitas yang tinggi namun terkait pembuatan dan penyimpanan minuta akta secara elektronik belum secara eksplisit di atur didalam ketentuan perundangundangan. dalam pelaksanaannya banyak dibutuhkan infrastruktur yang mendukung untuk menjamin keamanan dan kepastian dalam penyelenggaraan *cyber notary/e-notary*. Dalam pelaksanaan *cyber notary/e-notary* pemerintah dapat menentukan prosedur seperti apa yang dapat digunakan oleh notaris mulai dari pembuatan akta hingga penyimpanannya secara elektronik agar kekuatan minuta akta notaris tetap sempurna dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang otentik dalam persidangan ketika penyimpanannya di alihkan menjadi elektronik.

Kata Kunci: *Penyimpanan, Minuta Akta, Elektronik*

THE URGENCY OF ELECTRONIC STORAGE OF ACT MINUTA AND ITS PRACTICE

Riki Kurniawan, 2120123022, Master of Notary, Faculty of Law, Andalas University, 2024

ABSTRACT

Cyber notary utilizes technological advances for notaries in carrying out their daily duties, such as: digitizing documents, signing deeds electronically and other similar things. Cyber notary provides opportunities for authority in terms of storing documents electronically in the form of electronic documents. So there is a difference with conventional notaries who only store deeds in paper form. The formulation of the problem in this research is first, what is the urgency of storing deed minutes electronically in the information technology era, second, what is the practice of storing deed minutes in hardcopy form, third, what is the legal responsibility of the notary in storing deed minutes? This research uses a normative juridical approach method. Research results: The application of cyber notary/e-notary began with the emergence of Law number 2 of 2014 concerning Amendments to the Position of notaries, in which there is article 15 paragraph 3 UUJN which opens up the opportunity for notarial activities to be carried out electronically. Apart from that, in Article 16 paragraph 7 there is an opportunity for cyber notary/e-notary to apply to electronic documents, as well as electronic deeds because reading the deed before a notary is not mandatory when the parties choose not to have the deed read out because the parties have read it themselves. Article 68 paragraph (1) Archives Law, Government Regulation no. 28 of 2012 concerning the implementation of Law no. 43 of 2009 concerning Archives, Article 5 paragraph (4) letter b of the ITE Law, provides an interpretation that notarial deed minutes can be stored electronically. Many regulations open up opportunities for notaries to store records electronically, this gives rise to a high probability, but regarding the creation and storage of minutes of deeds electronically it has not been explicitly regulated in statutory provisions. In its implementation, a lot of supporting infrastructure is needed to ensure security and certainty in the implementation of cyber notary/e-notary. In implementing cyber notary/e-notary, the government can determine what procedures can be used by notaries starting from making the deed to storing it electronically so that the strength of the minutes of the notarial deed remains perfect and can be used as authentic evidence in trials when its storage is transferred to electronic .

Keywords: *Storage, Deed Minutes, Electronics*

